



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
Jl. Bhayangkara No. 9 Bandar Jaya, Lahat 31414
Laman : bapaslahat.kemenumham.go.id, Pos-el : bapaslahat@ymail.com

31 Desember 2025

Nomor : WP.6.PAS.21.PR.03-1149
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025
pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Sumatera Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan Nomor : WP.6.PR.03-083 Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Permintaan LKjIP Semester I dan Semester II 2025. Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2025 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Bapas Kelas II Lahat,

Permansyah

Tembusan :
1. Arsip



SEMESTER II TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKJIP

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMSEL

**IMIPAS
PRIMA**

#GuardandGuide

BerAKHLAK
BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

#SATU LANGKAH
SATU PEMERINTAH
SATU BANGSA

KATA PENGANTAR

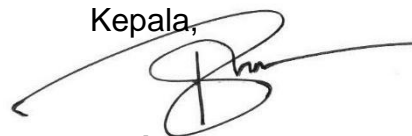
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Semester II Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Semester II Tahun 2025 ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam kurun 1 (satu) tahun. Pada laporan ini disajikan Perencanaan Kinerja Tahun 2025, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "**good governance**".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Semester II Tahun 2025 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang Tahun 2025. Apresiasi layak diberikan kepada seluruh insan pengayoman Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi positif dalam pencapaian kinerja melalui sasaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Kedepan, akan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjadikan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat lebih **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Akuntabel)** dan **Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)**, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat.

Lahat, 31 Desember 2025

Kepala,



Perimansyah

NIP. 19681106 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Semester II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat kepada publik atas pelaksanaan mandat konsistensi dan visi-misi Presiden dan dijabarkan dalam Renacana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025 dapat dinyatakan **“berhasil”**, karena telah memenuhi target capaian dan telah terealisasi. Kedepan untuk mencapai visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif. Dalam mendukung capaian kinerja Tahun 2025 Pagu Anggaran sebesar **Rp 4.201.318.000,-** telah direalisasi hingga bulan Desember 2025 sebesar **Rp 3.368.676.568** atau sebesar **80,18%**. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebagaimana dijelaskan tersebut di atas menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Pencapaian tersebut sejalan dengan target-target pada Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel yang berlandaskan tata nilai **“PRIMA”** yaitu **Profesional, Responsif, Integritas, Modern** dan **Akuntabel**, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	belum terlaksana	belum terlaksana
		Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	75,53%	100,71%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	97,18%	138,83%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	97,18%	388,72%
		Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	450%	2250%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,78	107,7%
Nilai Rata-rata					440,85%

Adapun Sasaran Kegiatan yang telah dicapai sepanjang Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan 1 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), "Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan" dengan target persentase 2,5% dan selama Tahun 2025 kegiatan tersebut **belum terlaksana**. Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), "Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan" dengan target persentase 75% telah direalisasi 75,53% atau tercapai kinerja sebesar 100,71%.
- Sasaran Kegiatan 2 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), "Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat" dengan target 70%, telah direalisasi 97,18% atau tercapai kinerja sebesar 138,83%.

3. Sasaran Kegiatan 3 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), “Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial” dengan target 25%, telah direalisasi 97,18% atau tercapai kinerja sebesar 388,72%, Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), “Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif” dengan target kinerja 20%, telah direalisasi 450% atau tercapai kinerja sebesar 2250%.
4. Sasaran Kegiatan 4 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan” dengan target 100%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing” dengan target kinerja 3,51, telah direalisasi 3,78 atau tercapai kinerja sebesar 107,7%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. ASPEK STRATEGIS	4
E. ISU STRATEGIS	5
F. SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. REALISASI ANGGARAN	41
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	43
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	45
BAB IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	48
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
3. PRESTASI/PENGHARGAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor : MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025.

LkjIP Semester II Tahun 2025 Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

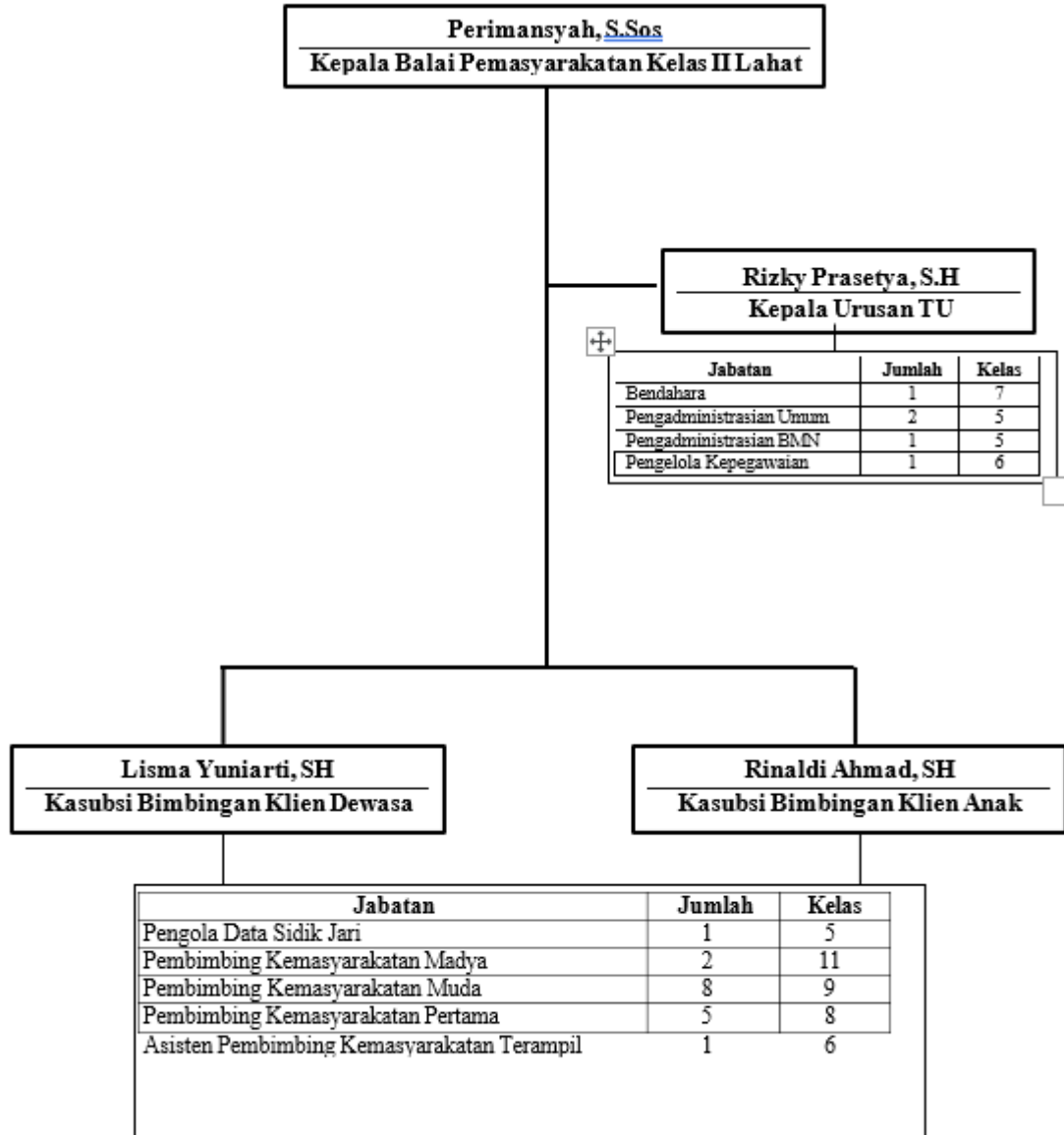
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien Pemasarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti siding peradilan di Pengadilan Negeri dan siding Dewan Pembina Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasarakatan yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai.

Struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat terdiri dari Kepala Balai Pemasarakatan, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak. Kepala Bapas Kelas II Lahat mempunyai tugas membantu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas di bidang Penelitian, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Klien. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat secara keseluruhan yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Dewasa. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas

meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Anak. Berikut ini merupakan Struktur Organisasi pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan LkJIP dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran negara. LkJIP berperan sebagai instrumen manajemen

kinerja yang berorientasi pada hasil (result-based management), sekaligus sebagai sarana evaluasi atas efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan program serta kegiatan sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi dan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029.

b. Tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat dan masyarakat;
2. Menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
3. Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di seluruh unit organisasi, termasuk Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis;
4. Mendorong terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, adaptif dan berorientasi hasil sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

D. ASPEK STRATEGIS

Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk bahan peradilan, membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak
2. Melakukan Registrasi klien Pemasarakatan;
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak
4. Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan Sidang Diversi serta sidang pembinaan pamasarakatan di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik dan Klien Pemasarakatan yang membutuhkan *after care*;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai

E. ISU STRATEGIS

1. Komitmen melayani dari para pegawai yang masih perlu ditingkatkan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu dimaksimalkan. Selain itu, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus transformasi dan perkembangan politik.
2. Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah menerima hibah berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Lahat, akan tetapi pihak TNI KODIM 405 Lahat (KODAM II SRIWIJAYA) menyatakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik TNI AD.
3. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Klien, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah membuat inovasi berupa **Aplikasi “Si Balan” (Sistem Informasi Bapas Lahat Alap Nian)**, dimana pengguna layanan dapat mengetahui data Klien, penelusuran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), data bimbingan, wajib lapor Klien dan lainnya.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Semester II Tahun 2025 berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor : MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Semester II Tahun 2025
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Semester II Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Semester II Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2026

- LAMPIRAN**
- Perjanjian kinerja tahun 2024;
 - Perjanjian kinerja tahun 2025;
 - Prestasi dan penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. VISI

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 - 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung 8 misi atau Asta Cita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.

Selain itu Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi. Berikut Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI adalah sebagai berikut:

VISI Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025 - 2029:

"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045".

MISI 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan pelayanan serta jaminan perlindungan Imigrasi dan Pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan.

TUJUAN 1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan.

MISI 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Imigrasi dan Pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas..

TUJUAN 2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan

b. MISI

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan 13 Program Akselerasi karena adanya kebutuhan reformasi besar dalam bidang imigrasi dan pemasarakatan yang harus selaras dengan arah pembangunan nasional (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan menjadi lebih terstruktur, terukur, dan bisa diimplementasikan di seluruh unit kerja.

Isi 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan;
2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan;
3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM;
4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area UPT Pemasarakatan;
5. Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif;
6. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
7. Pengembangan *Autogate* pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional;
8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
9. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
10. Pengembangan *lounge* khusus untuk pekerja migran;
11. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan;
12. Membangun tambahan Lapas *Modern Super Maximum Security* dan Lembaga Pendidikan berstandar Internasional;
13. Meningkatkan kebanggaan Lembaga Pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasarakatan.

c. TATA NILAI

1) Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *corevalues* ASN ‘**BerAKHLAK**’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “**BerAKHLAK**” merupakan akronim dari **Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar 2.1 Core Values ASN Ber-AKHLAK

2) Tata Nilai PRIMA

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2025-2029 Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan “**PRIMA**” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada didalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PRIMA adalah akronim dari “**Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel**”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
2. **Responsif:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarkatan;
3. **Integritas:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
4. **Modern:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. **Akuntabel:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga.

- **Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PERIMANSYAH
 Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWEDI SUPRIYATNO
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 November 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 Pemasarakatan Sumatera Selatan



Erwedi Supriyatno

Pihak Pertama,
 Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat



PERIMANSYAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%
		2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%
		2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 975.465.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

Rp. 3.018.548.000,-

Palembang, 20 November 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 Pemasyarakatan Sumatera Selatan



Erwedi Supriyatno

Pihak Pertama,
 Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat



PERIMANSYAH

Visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk bahan peradilan, membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak
2. Melakukan Registrasi klien Pemasyarakatan;
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak
4. Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan Sidang Diversi serta sidang pembinaan pemasyarakatan di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik dan Klien Pemasyarakatan yang membutuhkan *after care*;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan dengan target yang harus dicapai Bapas kelas II Lahat terdapat 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yakni:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan.
2. Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat.
3. Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial.
4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2025, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat memperoleh anggaran sebesar **Rp 4.201.318.000,-** dan telah berhasil direalisasikan hingga bulan Desember 2025 sebesar **Rp 3.368.676.568,-** atau sebesar **80,81%**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan menghasilkan nilai pencapaian Sasaran Kegiatan.

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Kegiatan Semester II Tahun 2025 Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	2	50,36%	Cukup
2.	Meningkatnya klien pemsarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1	138,83%	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	2	1319,36%	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	2	103,85%	Sangat Memuaskan

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Semester II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	belum terlaksana	belum terlaksana
		Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	75,53%	100,71%
2.	Meningkatnya klien pemsarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemsarakatan yang siap bermasyarakat	70%	97,18%	138,83%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	97,18%	388,72%
		Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	450%	2250%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,78	107,7%
Nilai Rata-rata					440,85%

Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan

Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 2 indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan (2,5%) dan Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan (75%)



Gambar 3.1. Sasaran Kegiatan I dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025**

Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan I pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. Realisasi kinerja Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan diperoleh dari *Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif* dibagi *Jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan*, dikali dengan 100%.

Tabel 3.3 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	0%	0%

$$\begin{aligned} \text{Realsasi} &= \frac{A}{B} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-1 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{2,5\%} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

Keterangan :

% = Persentase

A : Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif)

B : Jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan **belum terlaksana**, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan maksimal pada tahun 2026.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja Kegiatan tersebut **belum terlaksana**.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	-	-	-	2,5%	0%	0%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi kinerja Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan pada tahun 2025 dan target jangka menengah tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja Kegiatan tersebut **belum terlaksana**.

Tabel 3.5 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan **belum terlaksana**.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan **belum terlaksana**.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025

Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan I Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat. Realisasi kinerja Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif didapatkan dari *Jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif*) dibagi

Jumlah permintaan pendampingan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum), dikali dengan 100%

Tabel 3.6 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan di Luar Peradilan	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif	75%	75,53%	100,71%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{A}{B} \times 100\% \\ &= \frac{71}{94} \times 100\% = 75,53\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-2 adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{75,53\%}{75\%} \times 100\% = 100,71\% \end{aligned}$$

Keterangan :

% = Persentase

A : Jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif)

B : Jumlah permintaan pendampingan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum)

Pada tahun 2025 Jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif) ialah 71 anak dan Jumlah permintaan pendampingan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) ialah 94 anak, maka diperoleh realisasi kinerja sebesar 75,53% dengan target kinerja 100,71%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif pada tahun 2025 yaitu 75,53% dengan capaian kinerja 100,71%. Sedangkan pada tahun 2024 Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk

Upaya Keadilan Restoratif bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan. Sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif	-	-	-	75%	75,53%	100,71%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi kinerja Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif pada tahun 2025 yakni 75,53% dengan target kinerja 75%.

Tabel 3.8 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif	75%	80%	85%	90%	95%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian dari indikator tersebut, ialah :

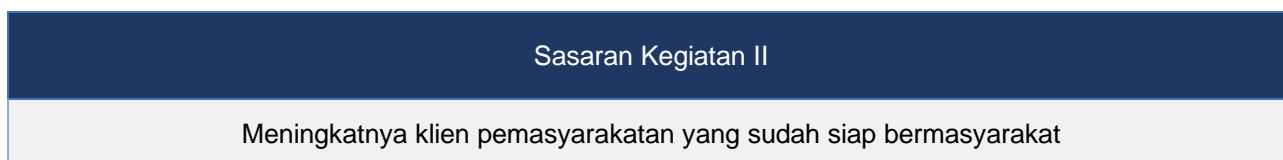
- Kualitas Komunikasi Antara pihak
- Partisipasi dan sikap kooperatif pihak terkait baik pelaku, saksi maupun korban
- Pemahaman semua pihak akan manfaat proses restoratif justice melalui Diversi
- Kompetensi dan ketrampilan komunikasi, mediasi petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam menyelesaikan suatu kasus terkait din luar jalur peradilan.

- Terjalannya kolaborasi yang kuat antara Bapas, APH dan Steakholder lainnya.

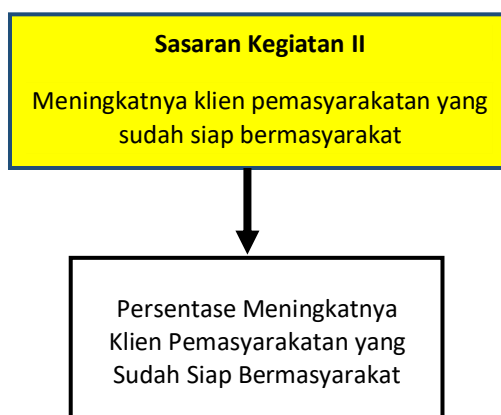
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Adapun kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut :

- Koordinasi dan sinergi dengan APH lain terkait penyamaan persepsi terkait pelaksanaan Proses Hukum kepada ABH sesuai dengan mekanisme UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pelaksanaan Impelementasi KUHP No.1 Tahun 2023
- Kegiatan Sosialisasi dan edukasi bersama *stakeholder*, terutama terhadap permasalahan anak yang ada di Wilayah kerja Bapas Kelas II Lahat



Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu yaitu : Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat (70%)



Gambar 3.2. Sasaran Kegiatan II dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025

Persentase meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan II Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. Realisasi kinerja Persentase meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat didapatkan dari *Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembimbingan* dibagi *Total klien*, dikali dengan 100%

Tabel 3.9 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	70%	97,18%	138,83%

$$\text{Realisasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{1549}{1594} \times 100\% = 97,18\%$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-1 adalah:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{97,18\%}{70\%} \times 100\% = 138,83\%$$

Keterangan :

A = Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembimbingan

B = Total klien

Pada tahun 2025 Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembimbingan, yakni 1549 dan total Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat ialah 1594. Sehingga didapatkan capaian kinerja yaitu 138,83%, realisasi kinerja 97,18% dengan target kinerja 70%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Persentase meningkatnya Klien Pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat pada tahun 2025 yaitu 97,18% dengan capaian kinerja 138,83%. Sedangkan pada tahun 2024 Persentase meningkatnya Klien Pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan. Sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase meningkatnya Klien Pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat	-	-	-	70%	97,18%	138,83%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Realisasi kinerja Persentase meningkatnya Klien Pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat pada tahun 2025 yakni 97,18% dengan target kinerja 70%.

Tabel 3.11 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase meningkatnya Klien Pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase meningkatnya Klien Pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan capaian dari indikator tersebut, ialah :

- Efektivitas Program Pembimbingan, Pengawasan dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- Dukungan Keluarga
- Lingkungan Masyarakat yang menerima dengan baik
- Peningkatan Keterampilan Kerja dan pembinaan kemandirian yang memadai di Lapas/Bapas
- Perubahan Sikap dan Kesadaran Diri Klien

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut :

- Program Pembimbingan dan Pengawasan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) merupakan fondasi utama dalam memastikan klien mampu beradaptasi kembali di masyarakat.
- Program Pelatihan Keterampilan kerja merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing klien di dunia kerja. Kegiatan ini dapat dilakukan di Lapas, Bapas, atau melalui kerja sama Dinas/UMKM.

- Kegiatan Integrasi Sosial seperti pembinaan keagamaan, kegiatan keorganisasian, atau pelibatan tokoh masyarakat meningkatkan penerimaan sosial terhadap klien.
- Kegiatan Penguatan Dukungan Keluarga, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Klien.

Sasaran Kegiatan III
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial

Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu yaitu : Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial (25%) dan Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif (20%)



Gambar 3.3. Sasaran Kegiatan II dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025**

Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan III Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. Realisasi kinerja Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial didapatkan dari *Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan* dibagi *Total klien*, dikali dengan 100%

Tabel 3.12 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	25%	97,18%	388,72%

$$\text{Realisasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{1549}{1594} \times 100\% = 97,18\%$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-1 adalah:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{97,18\%}{25\%} \times 100\% = 388,72\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

B = Total klien

Pada tahun 2025 Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yakni 1549 dan total Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat ialah 1594 .Sehingga didapatkan capaian kinerja yaitu 388,72%, realisasi kinerja 97,18% dengan target kinerja 25%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial pada tahun 2025 yaitu 97,18% dengan capaian kinerja 388,72%. Sedangkan pada tahun 2024 Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan.

Sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja SK III dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	-	-	-	25%	97,18%	388,72%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Realisasi kinerja Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial pada tahun 2025 yakni 97,18% dengan target kinerja 25%.

Tabel 3.14 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	25%	30%	35%	40%	45%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Beberapa penyebab keberhasilan Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial, ialah :

- Pembinaan dalam lapas yang efektif (pembinaan kepribadian dan kemandirian)
- Pendampingan dan pengawasan optimal oleh Bapas
- Dukungan keluarga dan tokoh masyarakat

- Sosialisasi dan komunikasi yang tepat kepada masyarakat
- Perilaku positif klien selama reintegrasi
- Ketersediaan pekerjaan dan kegiatan produktif
- Lingkungan sosial yang inklusif dan minim stigma

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial dipengaruhi oleh program yang :

- Program kemandirian dan kepribadian yang dilaksanakan oleh Lapas/Bapas
- Kegiatan pendampingan, pengawasan dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

• Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025

Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan III Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. Realisasi kinerja Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif didapatkan dari *Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan* dikurangi *Baseline satu tahun sebelumnya* dibagi *Baseline satu tahun sebelumnya*, dikali dengan 100%

Tabel 3.15 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	20%	450%	2250%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{(A - B)}{B} \times 100\% \\ &= \frac{(11-2)}{2} \times 100\% = 450\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-2 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{450\%}{20\%} \times 100\% = 2250\% \end{aligned}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan – (B)

B = Baseline satu tahun sebelumnya

Pada tahun 2025 Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan, yakni 11 Pokmas dan jumlah Baseline satu tahun sebelumnya ialah 2 Pokmas. Sehingga didapatkan capaian kinerja yaitu 2250%, realisasi kinerja 450% dengan target kinerja 20%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 yaitu 450% dengan capaian kinerja 2250%. Sedangkan pada tahun 2024 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan. Sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja SK III dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	-	-	-	20%	450%	2250%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Realisasi kinerja Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 yakni 450% dengan target kinerja 20%.

Tabel 3.17 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

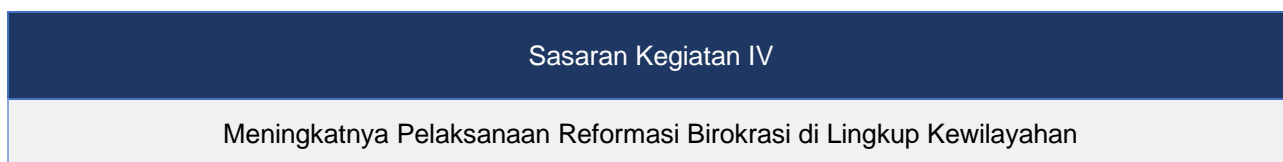
Dengan akan berlakunya KUHP No.1 Tahun 2023 pada tahun 2026 mendatang, Bapas Kelas II Lahat dan semua *stakeholder* dihimbau dan diinstruksikan untuk bersiap dalam mengimplementasikan KUHP tersebut. Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan, sejak awal tahun 2025 sudah gencar melakukan sosialisasi ke seluruh UPT Pemasarakatan se-Indonesia, agar dapat bersiap menyongsong KUHP Baru dengan menjajaki setiap Instansi terkait.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

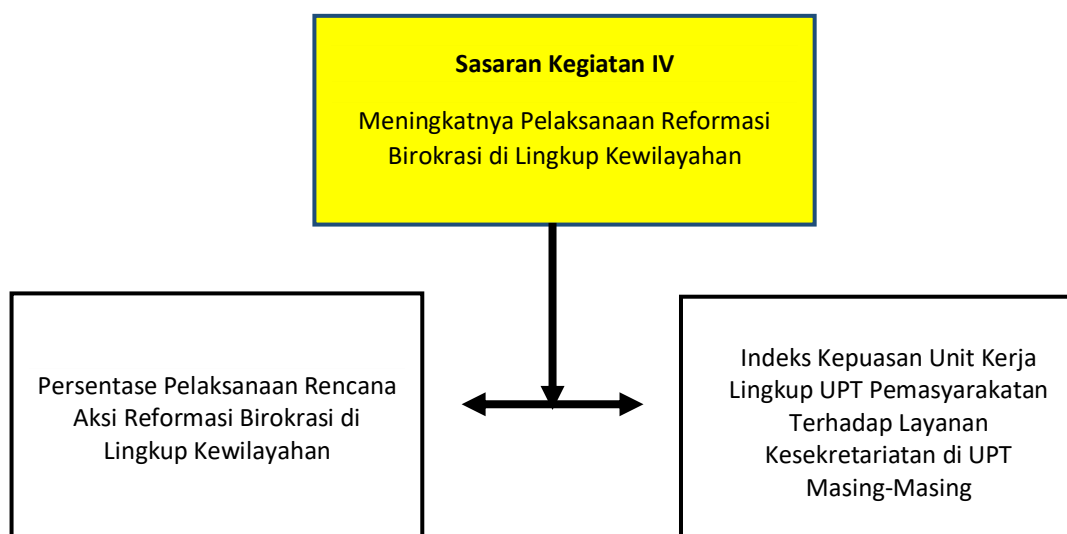
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator kegiatan tersebut :

- LABAMASA (Bapas Lahat Masuk Desa) merupakan program yang dirancang untuk menjangkau Klien yang tidak dapat datang langsung ke Bapas Kelas II Lahat baik karena keterbatasan tertentu maupun karena ketidakaktifan atau ketidak kooperatifan Klien dalam mengikuti proses pembimbingan, sehingga pengawasan tetap dapat berjalan secara optimal, sekaligus memastikan klien tetap terpantau dan memperoleh layanan yang mereka butuhkan.

- Pokmaslipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan) merupakan kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (Lapas, Rutan, Bapas) untuk mendukung proses pembinaan serta reintegrasi sosial. Dengan tujuan mendukung proses pemasarakatan melalui peran serta masyarakat, mencakup membantu pembinaan dan reintegrasi sosial, memperkuat dukungan sosial bagi warga binaan, meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat, memberikan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan dan menjadi mitra strategis pemasarakatan



Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu yaitu : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (100%) dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing (3,51)



Gambar 3.4 Sasaran Kegiatan IV dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan IV. Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diperoleh dari *Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan* dibagi *Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan* dikali 100%

Tabel 3.18 Capaian Target dan Realisasi SK IV dan IKK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{A}{B} \times 100\% \\ &= \frac{58}{58} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-1 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Pada Tahun 2025 Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan sudah berjalan hingga bulan Desember (Semester II) 2025 dengan kelengkapan dokumen data dukung 100%, sehingga *Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan* ialah 58 indikator dan *Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan* ialah 58 indikator. Sehingga didapatkan capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan ialah 100% dan realisasi kinerja 100% dengan target kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan ialah 100% dan realisasi kinerja 100% dengan target kinerja 100%.

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja SK IV dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan pada tahun 2025 yakni 100% dengan target kinerja 100%.

Tabel 3.20 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan kelengkapan Data dukung Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sudah berjalan dari bulan Januari hingga Desember 2025 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dan Dalam penguplodan data dukung dilaksanakan tepat waktu. Keberhasilan dalam persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kewilayahan dapat dipengaruhi oleh beberapa penyebab seperti Komitmen Pimpinan, Partisipasi Pegawai, Pengembangan Sistem Manajemen, Pelatihan dan Pengembangan SDM, Transparansi dan Akuntabilitas dan valuasi dan Pembelajaran Berkelanjutan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah dibentuk Tim Pokja Zona Integritas (ZI). Dalam pelaksanaannya Tim Pokja telah mengupload data dukung tepat waktu dan sesuai dengan koreksi dari Tim Verifikasi. Dengan demikian pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan sampai dengan bulan Desember 2025 dengan capaian kinerja mencapai 100% sesuai dengan target kinerja. Selain itu, terlaksananya program atau kegiatan yang dapat secara signifikan menunjang keberhasilan persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kewilayahan, yaitu

: Pelatihan dan Pengembangan SDM: Penerapan Sistem Informasi Manajemen: Audit dan Evaluasi Berkelanjutan: Kampanye dan Sosialisasi, Kolaborasi dan Konsultasi dengan Pihak Eksternal serta Reward dan Pengakuan:

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan IV. Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing diperoleh dari Survey Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di Bapas Kelas II Lahat, Tanggal 03 Desember 2025 yaitu sebesar 3,78. Adapun perhitungan capaian kinerja pada Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing, ialah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Capaian Target dan Realisasi SK IV dan IKK 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,78	107,7%

Capaian atas indikator kegiatan ke-2 adalah:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,78}{3,51} \times 100\% = 107,7\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2024, Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing merupakan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat didalam Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan target kinerja 3,1, realisasi kinerja yakni 1,20

dan capaian kinerja sebesar 38,71%. Pada Tahun 2025 capaian kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing ialah 107,7% dan realisasi kinerja 3,78 dengan target kinerja 3,51.

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja SK IV dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,1	1,20	38,71%	3,51	3,78	107,7%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing pada tahun 2025 yakni 3,78 dengan target kinerja 3,51.

Tabel 3.23 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan Survey Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di Bapas Kelas II Lahat, nilai Indeks yang didapatkan merupakan Nilai Indeks Kesekretariatan pada tanggal 03 Desember 2025 yaitu sebesar 3,78 dengan jumlah responden 37. Indeks Kepuasan yang mencapai target kinerja

pada layanan kesekretariatan merupakan hasil dari kombinasi faktor kualitas pelayanan, profesionalisme pegawai, ketersediaan sarana, serta ketepatan proses administrasi di lingkungan Bapas Kelas II Lahat.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa hal yang menjadi penunjang keberhasilan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Bapas Kelas II Lahat Terhadap Layanan Kesekretariatan :

- Penguatan Kompetensi SDM Kesekretariatan (tata naskah dinas, kearsipan, aplikasi SPBE dll)
- Penataan dan Penyederhanaan Prosedur Layanan Kesekretariatan (surat menyurat, penjadwalan, perjalanan dinas, pengadaan internal, arsip, data dukung dll)
- Digitalisasi Administrasi dan Penguatan SPBE Internal
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi
- Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Internal UPT serta Monitoring, Evaluasi, dan Pengelolaan Keluhan Internal
- Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Layanan Internal
- Implementasi Reformasi Birokrasi Internal dan Budaya Pelayanan

B. REALISASI ANGGARAN

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Semester II Tahun 2025 yang efektif dan efisien digambarkan dengan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran yang memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan, sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya organisasi dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional. Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Akuntabilitas Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3.24 Persentase Capaian Kinerja pada Sasaran Kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025

Sasaran	Anggaran	Penyerapan	Persentase (%)
Sasaran I	Rp. 214.500.000,-	Rp. 135.080.000,-	99,79%
Sasaran II	Rp. 553.660.000,-	Rp. 325.494.355,-	99,93%
Sasaran III	Rp. 83.485.000,-	Rp. 56.303.000,-	99,76%
Sasaran IV	Rp. 9.198.000,-	Rp. 900.000,-	11,94%
Jumlah	Rp. 860.843.000,-	Rp. 517.777.355,-	93,64%

Sumber : Hasil olah data dari Laporan Fa Detail (16 Segmen)

Berdasarkan tabel III.39 di atas, **Pada Sasaran Kegiatan I**, Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu : Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan dan Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan telah mencapai persentase penyerapan sebesar 99,79% dengan penyerpan anggaran hingga bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp. 135.080.000,- dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 214.500.000,- dan terdapat Pagu blokir.

Pada Sasaran Kegiatan II, yakni Meningkatnya klien pemsarakatan yang sudah siap bermasyarakat, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yakni : Persentase klien pemsarakatan yang siap bermasyarakat telah mencapai persentase penyerapan sebesar 99,93% dengan penyerpan anggaran hingga bulan Desember tahun 2025

sebesar Rp. 325.494.355,- dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 553.660.000,- dan terdapat Pagu blokir.

Pada Sasaran Kegiatan III, yakni Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yakni : Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial dan Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif, telah mencapai persentase penyerapan anggaran sebesar 99,76%, dengan penyerapan anggaran hingga bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp. 56.303.000,- dan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 83.485.000,- dan terdapat Pagu blokir.

Pada Sasaran Kegiatan IV, yakni Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yakni : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing, telah mencapai persentase penyerapan anggaran sebesar 11,94%, dengan penyerapan anggaran hingga bulan November tahun 2025 sebesar Rp. 900.000,- dan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.198.000,- dan terdapat Pagu blokir.

Sehingga diketahui hingga bulan Desember tahun 2025 seluruh penyerapan anggaran Sasaran Kegiatan telah mencapai Rp. 517.777.355,- dan persentase 93,64% dengan Anggaran yg tersedia Rp. 860.843.000,-. Hal ini terjadi karena terdapat pemblokiran efisiensi anggaran yang berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Tabel 3.25 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Per Jenis Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Pegawai	Rp 2.176.071.000,-	Rp 2.170.789.369,-	99,76%	Rp 2.128.277.000,-	Rp 2.045.132.784,-	96,09%
2.	Belanja Barang	Rp 1.755.349.000,-	Rp 1.738.151.469,-	99,02%	Rp 2.073.041.000,-	Rp 1.323.543.784,-	63,85%
3.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
Total		Rp 3.931.420.000	Rp 3.908.940.838,-	99,43%	Rp 4.201.318.000	Rp 3.368.676.568,-	80,18%

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pegawai di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat selama Tahun 2025 telah mencapai 96,09%. Hal ini jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 terjadi penurunan 3,67%, dimana capaian realisasi belanja pegawai pada tahun tahun 2024 ialah 99,76% .

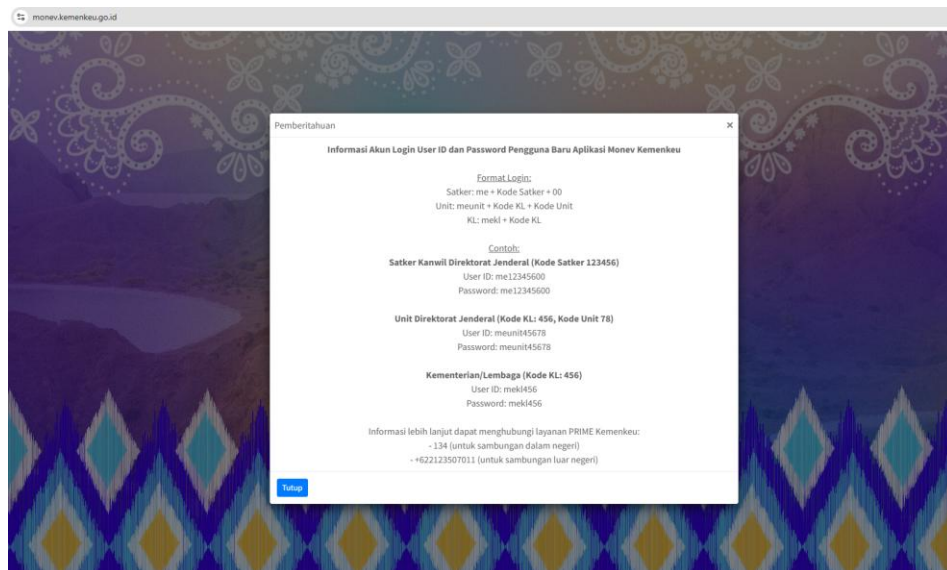
Realisasi belanja barang di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat selama Tahun 2025 mencapai 63,85%. Hal ini jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2024 terjadi penurunan 35,17%, dimana capaian realisasi belanja barang tahun 2024 ialah 99,02%. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Realisasi belanja modal di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat pada Tahun 2025 dan tahun 2024 yaitu tidak tersedia anggaran belanja modal (Nihil).

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART-DJA

Sampai dengan periode Tahun Anggaran 2025, Bapas Kelas II Lahat belum dapat melakukan input data pada aplikasi SMART. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya fitur input capaian kinerja pada aplikasi SMART sehingga proses pelaporan dan pemantauan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) belum dapat diakomodir secara elektronik melalui sistem tersebut. Kendala ini telah disampaikan kepada unit pengembangan aplikasi di tingkat pusat, dan saat ini sedang dalam proses penyempurnaan.



Gambar 3.5 Screenshot monev.kemenkeu.go.id

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAPAS KELAS II LAHAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	144	137	092708	BAPAS KELAS II LAHAT	Nilai	100.00	100.00	98.54	0.00	0.00	100.00	100.00	79.71	80%	0.00	99.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.71	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.27				100.00				

Gambar 3.6 Dashboard Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025
Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

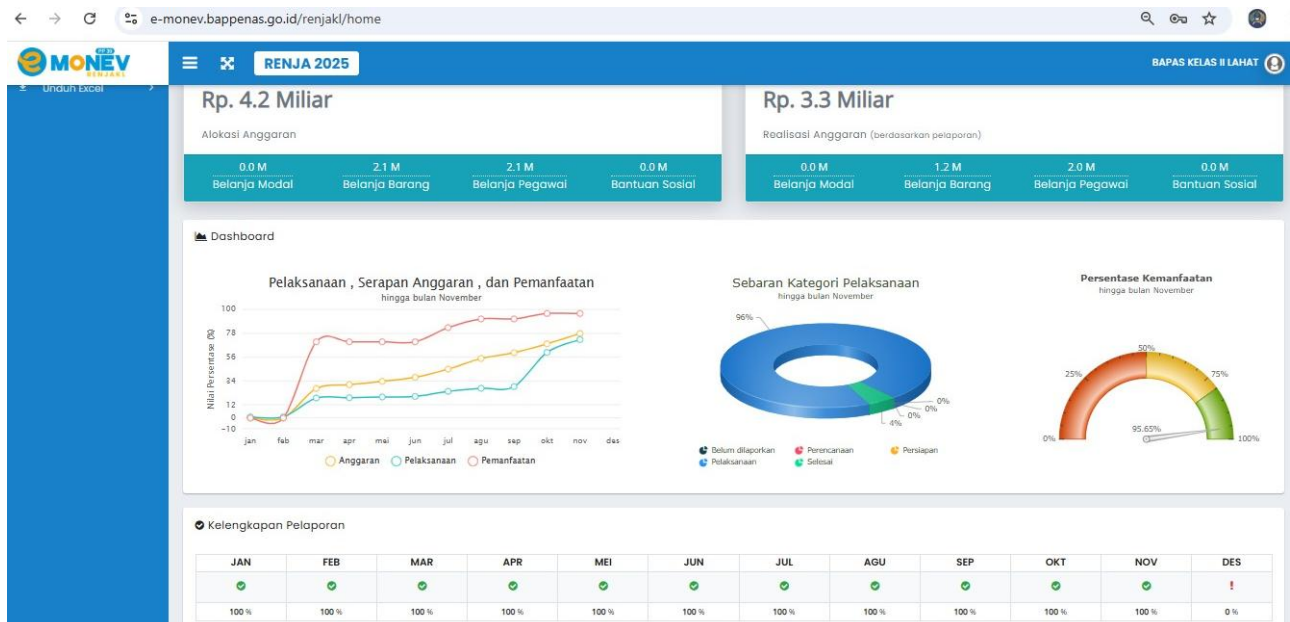
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu revisi DIPA dengan bobot 10%; revisi halaman III DIPA dengan bobot 15%; penyerapan anggaran dengan bobot 20%; belanja kontraktual dengan bobot 0; penyelesaian tagihan dengan bobot

0; pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 0, dispensasi SPM dengan bobot 0; dan capaian output dengan bobot 25%. Nilai IKPA yang diperoleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat sampai dengan tanggal bulan Desember 2025 pada aplikasi OM-SPAN Kemenkeu sebesar 99,64 dengan kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan dan realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah berjalan dengan baik dan kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah terlaksana dengan baik.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kinerja Kementerian atau Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui keluaran-keluaran prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bapennas.go.id>. Berikut data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025:



Gambar 3.7 Screenshot Aplikasi e-Monev BAPPENAS

Berdasarkan gambar di atas Kelengkapan pelaporan data realisasi komponen yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat pada setiap bulannya datanya 100% lengkap. Kemudian untuk kelengkapan pelaporan data realisasi rincian output pada setiap bulannya juga datanya 100% lengkap. Berdasarkan data realisasi yang

telah disajikan penggunaan dan realisasi anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat telah berjalan dengan baik dan kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat telah terlaksana dengan baik.

2. Kegiatan Prioritas Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7** yaitu: **(1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**



Gambar 3.8 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Semester II Tahun 2025. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025 sebagai wujud pertanggung jawaban publik.

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang telah memenuhi target. Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut juga ditunjang oleh program kerja berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk operasional yang dapat dipahami oleh pegawai di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, serta kualitas aparatur yang baik dilihat dari tingkat pendidikannya. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025 adalah:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM.
2. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan.
4. Belum berjalannya proses pemasarakatan secara optimal, seperti masih adanya Klien yang belum menyadari tanggung jawab dan kewajiban.
5. Adanya Klien yang melakukan pengulangan tindak pidana pada masa PB, CB dan CMB.

B. SARAN

Mengatasi permasalahan-permasalahan di atas untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat khususnya dalam pencapaian sasaran kegiatan harus dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan maupun diklat teknis.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap Klien Pemasarakatan maupun terhadap Petugas Pemasarakatan.
5. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya baik manusia maupun dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.
6. Terkait penyerapan anggaran, harus segera melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan menyusun jadwal untuk meningkatkan ketepatan realisasi anggaran.
7. Agar menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin.
8. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti pimpinan dan pegawai.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJATAHUN 2024
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perimansyah
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 196411201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Lahat

Perimansyah..
NIP. 196811061992031002

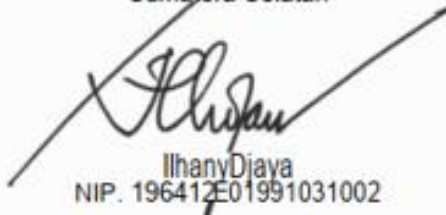
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

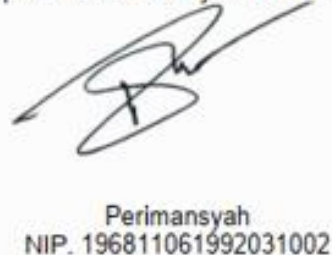
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 683.420.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 683.420.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.659.178.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.659.178.000,-

Palembang, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Selatan


Ilhany Djaya
NIP. 19641201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Labat


Perimansyah
NIP. 196811061992031002

Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perimansyah
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erwedi Supriyatno
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Sumatera Selatan



Erwedi Supriyatno

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Perimansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.975.465.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.3.219.881.000,-

Palembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Sumatera Selatan



Erwan Supriyatno

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat



Perimansyah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perimansyah
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erwedi Supriyatno
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Sumatera Selatan



Erwedi Supriyatno

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Perimansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator KinerjaKegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.975.465.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.3.219.881.000,-

Palembang, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat



Perimansyah



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Sumatera Selatan

Erwedi Supriyatno

Piagam Penghargaan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

